

Panglima TNI Tinjau Vaksinasi Massal Prajurit TNI, 130 Ribu Vaksin Disiapkan

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan pelaksanaan vaksinasi massal atau 'Serbuam' 130.000 Vaksin Covid-19 AstraZeneca bagi seluruh prajurit TNI di 10 Provinsi yang belum mendapatkan vaksin. Vaksin tersebut diberikan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Serbuam Vaksin Covid-19 AstraZeneca bagi Prajurit akan dilaksanakan secara serentak hari ini, Jumat (25/3) sekitar pukul 08.00 waktu setempat. Adapun di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Papua.

Proses pelaksanaan vaksin tersebut diharapkan akan selesai dalam waktu satu hari. TNI melibatkan 10.000 lebih personel yang bertugas sebagai vaksinator dalam membantu melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Panglima TNI direncanakan membuka, memonitor sekaligus turun langsung memantau Prajurit TNI dalam pelaksanaan proses vaksinasi. Panglima berharap, setelah menerima vaksin, para prajurit tetap jalankan Protokol Kesehatan. Para Babinsa dan Babinkamtibmas diminta terus memperintah untuk melaksanakan tracing.

Hal ini dilaksanakan setiap untuk mempercepat pencapaian herd immunity, sehingga program pemerintah ke depan dapat terwujud dengan cepat dan baik. Kemudian, Indonesia dapat sehat dan bebas Covid-19. ● mei

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko Enggan Bersaksi untuk Mantan Wali Kota

JAKARTA (IM) - Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menolak diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, Rabu (24/3).

Sedianya, Dewanti hendak diperiksa terkait kasus gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur pada 2011-2017. Proses pemeriksaan dilaksanakan di Balai Kota Batu, Jawa Timur.

"Yang bersangkutan hadir namun tidak bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi," kata Ali, Kamis (25/3).

Selain memeriksa wali kota Batu, Ali menyebut KPK juga memeriksa supir wali kota bernama Yunedi dan Direktur PT Tiara Multi Teknik bernama Yusuf. "Yang bersangkutan dikonfirmasi terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi diantaranya dalam bentuk sejumlah uang kepada pihak yang terkait dengan perkara ini," ucap Ali.

Ali mengatakan, saat saksi lain yakni Direktur PT Borobudur Medecon Ferryanto Tjokro tidak hadir memenuhi panggilan penyidik dan tidak

memberikan konfirmasi.

Sejak Januari 2021, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan kasus gratifikasi tersebut. KPK juga telah melakukan penggeledahan pada sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Selain kantor dinas, KPK sempat menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko.

Pada 2017, penyidik KPK menjerat Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam operasi tangkap tangan pada September. Eddy dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara oleh majelis kasasi Mahkamah Agung pada 2019. Dalam kasus tersebut, Eddy diduga menerima suap senilai Rp 500 juta terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemerintah Kota Batu, tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar.

KPK menetapkan dua orang tersangka lain dalam kasus tersebut, yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu, Edi Setyawan, dan Direktur PT Daiblana Prima Filipus Djap. ● mei

Alasan demisioner membuat Ketua Dewan Pembina PD kubu Moeldoko, Marzuki Ali dkk, mencabut gugatan 'pemecatan' yang dilakukan kubu AHY. Herzaky menganggap, alasan itu mengada-ada, dan ibarat pepatah 'tong kosong nyaring bunyinya'.

"Publik juga tahu, sah tidaknya Kongres tergantung pemilih suara, bukan karena kader gadungan. Mereka buat KLB ilegal, tidak dihadiri pemilik suara, tapi malah seakan-akan punya hak buat kepustakaan ini. Seperti orang yang tidak tahu etika, norma, dan aturan hukum," ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/3).

Padahal, kata Herzaky, politisi juga seharusnya punya tanggung jawab moral kepada publik. Untuk itu, seharusnya mereka memenuhi ruang publik dengan narasi-narasi yang bermanfaat dan mencerdaskan, bukan malah menebar fitnah dan hoaks.

"Pemecatan Marzuki Ali dan kawan-kawan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di internal Partai Demokrat, serta sejalan den-

gan UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Aturannya tegas dan jelas," ungkapnya.

"Yang bilang melanggar aturan itu, mungkin kebanayan buat atau baca berita hoax. Jadi, tidak bisa bedakan mana yang nyata, mana yang ilusi," imbuh pria yang akrab disebut Zaky itu.

Lebih lanjut Zaky menyebut, beginilah kalau demokrasi disesaki oleh para kader gedung dan petualang politik, bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power. Ia khawatir, bukan makai meroket kinerja demokrasi kita, melainkan tenggelam di titik nadir.

"Kami, Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY, sedang fokus bantu rakyat yang terdampak pandemi dan bencana. Tolong dibantu aja kerja nyata kami ini, jangan diganggu dengan intrik-intrik politik murahan," tuturnya.

Sadar Gugatan Lemah

Seperti diketahui, Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat Kubu Kongres Luar Biasa (KLB), Saiful Huda Ems sempat melontarkan alasan kenapa Marzuki Ali yang menjabat Ketua Dewan Pembina PD kubu Moeldoko mencabut gugatan pemecatan dari keanggotaan partai yang dilakukan kepengurusan PD Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Saiful membeberkan sejumlah alasan itu antara lain karena adanya KLB di Sibolangit yang diklaim telah mendemisioner AHY sebagai Ketua partai dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, sehingga tak ada urgensiya melanjutkan gugatan itu. Alasan lain, Saiful menganggap, kader partai tak ingin dipimpin oleh 'pelajaran mayor'.

Herzaky mempertanyakan latar belakang Saiful. Karena yang bersangkutan disebutnya dalam sebulan terakhir sebagai pengamat politik.

"Lalu, di kesempatan lain praktisi hukum. Komentarnya selalu mendukung Moeldoko, dan kerjanya menyerang kami. Sekarang, ketuhanan belangnya, Saiful ini jadi salah satu Kepala Departemen di parpol ilegal pimpinan Moeldoko," ujarnya

IDN/ANTARA



KPK PERIKSA DIRUT NONAKTIF PEMBANGUNAN SARANA JAYA

Direktur Utama Nonaktif Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/3). Yoory diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019.

karena adanya KLB di Sibolangit yang diklaim telah mendemisioner AHY sebagai Ketua partai dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, sehingga tak ada urgensiya melanjutkan gugatan itu. Alasan lain, Saiful menganggap, kader partai tak ingin dipimpin oleh 'pelajaran mayor'.

Bilang saja sejak awal pendukung Moeldoko dan GPK-PD. Kalau intelektual, biasanya berbicara atas dasar kajian akademis, bukan asal pesanan atau selera pimpinan," ujarnya.

"Sekarang, pakai klaim-klaim banyak pengamat politik profesional yang mendukung Moeldoko, dan kerjanya menyerang kami. Sekarang, ketuhanan belangnya, Saiful ini jadi salah satu Kepala Departemen di parpol ilegal pimpinan Moeldoko," ujarnya

saat dihubungi, Kamis (25/3).

Herzaky mengingatkan, jika memang bukan yang bisa dipegang obyektifitasnya, dan dapat dipercaya kredibilitasnya, maka jangan 'ngaku-ngaku' pakar dan pura-pura netral.

Lebih lanjut Zaky mengatakan, sudah jelas sejak awal gugatan yang dilayangkan Marzuki Ali dkk lemah dan tak berdasar. Sehingga, ketika melaksanakan gugatan berarti sama saja mengaku kelemparan AHY.

"Lah, telat mikir banget ini mereka. Berminggu-minggu baru sadar gugatannya lemah syahwat. Nafsunya menggebu-gebu, tapi tenaga dan isinya tidak ada," ketus Zaky. ● han

9 Fraksi di DPR Sepakati untuk Harmonisasi Draf RUU Kejaksaan

JAKARTA (IM) - Setelah fraksi di DPR RI menyepakati penyempurnaan harmonisasi draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (RUU Kejaksaan). Kesepakatan tercapai dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Kesembilan fraksi tersebut, yakni F-PDIPI, F-Golkar, F-Demokrat, F-PPP, F-Nasdem, F-Gerindra, F-PKS, F-PKB, F-PAN.

Revisi RUU Kejaksaan ini diusulkan langsung Komisi III DPR RI yang di dalamnya mengatur pengunitan kedua jaksa dalam sistem pemerintahan. RUU ini juga masuk ke dalam daftar 33 RUU Prioritas 2021.

"Kita sudah mendengar pandangan masing-masing-fraksi di DPR terkait harmonisasi RUU perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan masing-masing sudah menyepakati," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/3).

Supratman menjelaskan, dalam RUU Kejaksaan ini terdapat 8 poin yang dibahas yakni, penyempurnaan kewenangan kejaksaan untuk melaksanakan penyidikan, pengaturan mengenai intelijen, kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia, serta pengaturan fungsi Advocat General bagi Jaksa Agung.

Supratman mengatakan, pengaturan kewenangan kerja sama kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dari negara lain, pengaturan untuk kewenangan kejaksaan lain seperti memberikan pertimbangan dan keterangan dan penegasan peran kejaksaan dalam menjaga keutuhan kedaulatan negara pada saat dalam keadaan bahaya.

"Dalam revisi Undang-Undang tentang Kejaksaan terdapat 8 poin penting yang dibahas di Badan Legislasi, masing-masing anggota sudah memberikan pandangannya terkait ini. Saya harap akan segera diselesaikan," ujar Supratman sembari menutup rapat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh memaparkan draf RUU Kejaksaan yang diusulkan oleh komisinya di hadapan anggota Baleg DPR RI. ● han

LAPORAN PIUTANG HAPUS BUKU PERIODE 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)					
No	Nama Debitur	Pokok Hutang	No	Nama Debitur	Pokok Hutang
1	A RIYAN SUDIYANSYAH ND	150	118	DODI OKTAVIANTO	332
2	A WAHID ASYORI SE	72	119	d'ANDREAS BOSCO GOLENG	2,690
3	AAN KURNIAWAN	91	120	DRS CHAERUDDIN	550
4	ABDUL HAMID	1,426	121	DRL JALALUDIN	79
5	ABDUL MUTHOLIB	186	122	DWI SARI RAHADI	600
6	ABDUL ROCHIM	5	123	DWIMITRA LAMPUNG PERDANA	974
7	ABDUL SALAM	24	124	EDAHRI RAMA	229
8	ADDU'RRAHMAN	400	125	EDIAN JICHI	683
9	ABI KASWANI	5	126	EKA PUSITA DEWI	12
10	ABNER ALFRITS FRANSISKUS	249	127	EKA WAHYUNI	13
11	ABUT	66	128	EKO BUDIMAN	123
12	ADAM WAHYUDI	196	129	ELISKA HERMAWATI	533
13	ADE ACHMAD DRAJAT	47	130	ELIYANI	57
14	ADELAQORIAN	85	131	ELIZABETH KOKRAINELY	84
15	ADITYA ABDIACHMAN	72	132	ENDAH ROHAYATI	24
16	ADI PRADANA	46	133	ENDANG KOSWARA	81
17	AGUS HERIYANTO	87	134	ENDANG SRI HARTATI	465
18	AGUSTIN YUDO PURWANTI	217	135	ENDY	1,526
19	AHMAD GOZALI IR	105	136	ENGKON SUHENDRADA	251
20	AHMAD HASYIM FIRMANSYAH	131	137	ENINA WIKA VETRICHA WULANDARI	253
21	AHMAD YANI	52	138	ERMI SUNARDI	283
22	AHMAD YAZID SYAHPUTRA	94	139	ERINA REGINA LOMI DAWA	243
23	AI SOPIAH	118	140	ERIN TIQUA	303
24	ALEXANDER SOPLANIT	149	141	ERIN NINDARI	249
25	ALEXANDER TANJAYA	716	142	ERIN YULIANTI	220
26	AMBES ESA	93	143	ESHA OCTAVIA SELENDRA	304
27	AMINAR	66	144	FACHLI DWIDONO	64
28	AMINAR AL SULAIMAN	663	145	FAJARYAN RENALDI HAWK	208
29	AMIRAH AMRAN	889	146	FALEN CHRISNA HARMAWAN	135
30	AMIRAH AMRAN	89	147	FAHRIDAH DELITA AP	283
31	ANANG HERMAWAN	249	148	FAHRIAH NASRONI	233
32	ANANG KALEELEAN SAKKE	532	149	FAHMIATUL NUR MARO	160
33	ANDAES MULANEA	2,366	150	FEBI LEO NARDO	41
34	ANDI AGUS RYADY	149	151	FEBRY YANSYAH	500
35	ANDI ARIFAH SALIM	207	152	FEBRIONO	105
36	ANDI ARDIANSYAH	509	153	FERRY ARIFIN SEMBIRING IR	200
37	ANDI ARIFIN	244	154	FERRI ERWANSYAH	558
38	ANDI KHUMAS ANDI HUSAIN	889	155	FERGUS ALFRED INVESTINDO	63
39	ANDI MARKIAN	89	156	FERGUS ALFRED INVESTINDO	403
40	ANDIJAH BUDIMATOKO	575	157	FERGUS TOMASO	54,569
41	ANDRE WIJAYA	75	158	FRANISTIA MALLAIT BARUS	